

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, maju, bertaqwa, dan berakhlak mulia sehingga dapat hidup layak dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di belahan dunia, untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu usaha yang berkesinambungan dan terarah. Salah satu usaha tersebut tidak terlepas dari pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dicirikan oleh tiga hal yakni: pertumbuhan pada output nasional, perubahan struktur sosial, ekonomi dan politik serta terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Peningkatan produksi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses pembangunan mencakup proses perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan bagaimana peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada sektor-sektor ekonomi, yang tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun. Tercapai tidaknya kenaikan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber-sumber alam dan manusia yang tersedia di daerah.

Menurut **Arsyad** (1999 : 108) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, dan menurut Arsyad masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya-sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Keadaan ekonomi daerah yang berbeda-beda terutama karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dan pola pemanfaatannya serta kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai di daerah, menyebabkan pembangunan ekonomi daerah-daerah di Indonesia menjadi tidak sama dan ini mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional. Pemecahan yang biasa dilakukan selama ini adalah pemecahan yang bersifat agregatif, yakni dengan usaha memperbesar peran sektor-sektor ekonomi di

masing-masing daerah tanpa mengetahui sektor unggulan untuk dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selama beberapa tahun menjelang terjadinya krisis pada tahun 1997, Indonesia mengalami masa keemasan perekonomian yang ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1996 mencapai 8%, sehingga menjadikan Indonesia mendapat julukan dari dunia internasional sebagai salah satu calon negara “macan Asia”, bersama-sama dengan beberapa negara Asia lain seperti Taiwan dan Singapura.

Setelah mulai terjadi krisis pada pertengahan tahun 1997, perekonomian Indonesia menjadi sangat terpuruk. Nilai tukar rupiah terdepresiasi dari Rp. 2.600,00 per dollar AS pada bulan Juli 1997 menjadi Rp. 3.000,00 per dollar AS pada bulan Agustus-September 1997, bahkan mencapai nilai terendah pada akhir bulan Januari 1998 sebesar Rp. 16.000,00 per dollar AS. Selain itu tingkat inflasi meningkat tajam, hingga mencapai 34,22% pada tahun 1997/1998 padahal tahun sebelumnya berada di bawah 10%. Akibatnya para produsen menurunkan produksinya karena membengkaknya biaya produksi, sehingga banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau diberhentikan. **(R. Inne Rosalina : 2000 : 3)**

Dengan meningkatnya tingkat pengangguran, maka daya beli masyarakat menurun. Penurunan daya beli yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan masyarakat ini menyebabkan hasil produksi kurang terserap oleh konsumsi masyarakat. Secara nasional, hal ini dapat dilihat dari penurunan konsumsi pada tahun 1997, dan mencapai angka pertumbuhan yang negatif pada tahun 1998. Sebagai akibatnya adalah melambatnya laju roda perekonomian Indonesia.

Penurunan aktivitas ekonomi ini dapat dilihat dari angka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 1996 tercatat sebesar 8%, menurun menjadi 4,7% pada tahun 1997 (Bank Indonesia, 1998). Dan penurunan ini masih dilanjutkan pada tahun berikutnya yang mencapai angka -13,7%.

Keterpurukan yang sama juga dialami oleh Jawa Barat pada tingkat regional. Wilayah Jawa Barat, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai ibukota negara, tentu saja menjadi barometer kondisi makro perekonomian Indonesia. Provinsi Jawa barat merupakan wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar yakni sekitar 42 juta jiwa, dengan jumlah wilayah administratif sebanyak 26 kabupaten/kota. Kondisi ini menjadi potensi untuk menggerakkan roda perekonomian Jawa Barat ke arah yang lebih maju. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai regulator, dalam menyusun berbagai kebijakan dalam bidang ekonomi, haruslah yang pro aktif terhadap proses akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto. Tabel 1.1 memperlihatkan gambaran pertumbuhan PDRB Jawa Barat Periode 1980-2009 berdasarkan harga konstan tahun 2000. Pada sepuluh tahun pertama penelitian yakni tahun 1980-1989, laju pertumbuhan ekonomi terlihat fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 1983-1984 dari 5.02% menjadi 17,18%. Namun pada tahun berikutnya yakni tahun 1985 kembali mengalami penurunan menjadi 6.12%. Kemudian pada tahun 1987-1989 laju pertumbuhan ekonomi jawa barat mengalami kenaikan tiap tahunnya.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 1980-2009  
(Atas Dasar Harga Konstan 2000)**

Tahun	PDRB Riil (Juta Rp)	LPE (%)
1979	56948727,1	-
1980	63435187,1	11,39
1981	70654111,4	11,38
1982	74879227,2	5,98
1983	78638164,5	5,02
1984	92148201,1	17,18
1985	97787671,0	6,12
1986	104222099,8	6,58
1987	108318028,3	3,93
1988	117048461,4	8,06
1989	126623025,5	8,18
1990	138588901,4	9,45
1991	148137676,7	6,89
1992	158522127,9	7,01
1993	169697937,9	7,05
1994	181916189,4	7,2
1995	196596825,9	8,07
1996	212422870,4	8,05
1997	222767864,2	4,87
1998	183182014,7	-17,77
1999	187395201,0	2,3
2000	195753027,0	4,46
2001	203368999,0	3,89
2002	211391702,7	3,94
2003	221628173,7	4,53
2004	233057690,9	4,77
2005	242935198,9	5,61
2006	257535975,1	6,02
2007	274180307,8	6,48
2008	290171128,8	5,83
2009	302648487,6	4,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Berbagai Edisi, data diolah (lampiran 1)

Pada periode 1980-1989 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berfluktuatif namun memiliki tren yang positif. Hal ini terjadi karena Jawa Barat yang mempunyai kedudukan sebagai penyangga DKI Jakarta banyak memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi khususnya kemajuan di bidang sarana dan prasarana yang ada di Jakarta. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang perkembangan ekonomi Jawa Barat.

Pada periode 1990-1997 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cenderung stabil, di atas 5 %. Pada tahun 1995 perekonomian Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga bergerak di level 8,05% atau sebesar 196.596.825,9 juta rupiah. Tahun 1996 dan 1997 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak setinggi tahun 1995, tapi jika dilihat dari nilai nominal PDRB Jawa Barat tetap mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan 11,05%.

Di akhir tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang memporakporandakan perekonomian nasional. Berawal dari terjadinya krisis nilai tukar yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Pada awal tahun 1997 mulai terkena dampak perubahannya, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS serta mundurnya sektor produksi dalam negeri semakin mereduksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak dari krisis tersebut di tahun 1998 semakin efektif mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri (**BPS: 1999: 56**).

Perekonomian daerah tahun 1998 masih terkonsentrasi sebesar -17,77 persen karena belum pulihnya sektor riil yang menjadi *engine growth* perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, tahun 1998 bisa dikatakan krisis berada pada puncaknya, terbukti hampir semua lapisan



masyarakat terkena dampak krisis. Bukan hanya krisis moneter, akan tetapi lebih mewabah ke krisis ekonomi, sosial dan keamanan. Bahkan lebih jauh lagi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Mengawali tahun 1999 PDRB mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang positif yaitu 2,30%. Periode 2001-2004 PDRB mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang positif yaitu 3,89%, 3,94%, 4,53%, dan 4,77% dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan stabil. Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat adalah komponen konsumsi rumah tangga yaitu tumbuh rata-rata 68,62%, konsumsi pemerintah 16,33%, dan ekspor netto 5,73%.

Pada tahun 2005, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 242,9 triliun angka pertumbuhannya berada pada 5,61%. Sedangkan pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2006 sebesar 6,02% dan tahun 2007 naik menjadi 6,48%. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,83%. Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih positif 4,3% atau tidak jauh dari LPE nasional yakni 4,5 persen. Kinerja perekonomian Jawa Barat pada tahun 2010 cukup baik dibandingkan tahun 2009. Hal tersebut, terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 6,09%, lebih kecil 0,01% dari laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1%, sementara laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2009 hanya 4,19%. Selama periode tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 mengalami peningkatan

sebesar 6,09% dari Rp. 303,40 trilyun tahun 2009 menjadi Rp. 321,87 trilyun pada tahun 2010.

Seperti diuraikan di atas pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dianggap belum berkualitas karena laju pertumbuhan ekonomi yang positif ternyata belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti diindikasikan oleh tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang relatif masih tinggi. Bahkan pengangguran di Jawa Barat pada tahun 2007 mencapai 2.38 juta jiwa dan penduduk miskin mencapai 30,79 persen. Jawa Barat masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh masih tingginya proporsi penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 (data maret 2010) adalah sebesar 11,27% dari jumlah penduduk Jawa Barat, menurun dari tahun 2009 yang mencapai angka 11,96% (data susenas 2009). Tingkat kemiskinan ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan.

Berpijak pada latar belakang di atas tentunya masalah pertumbuhan ekonomi sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, dalam hal ini penulis membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni investasi dan tabungan. Selengkapnya judul penelitian yang akan penulis angkat adalah **“Penerapan Model Harrod-Domar dalam Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Periode 1980-2009”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi ( $I_t$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ( $Y_t$ ) di Jawa Barat periode 1980-2009?
2. Bagaimana pengaruh tabungan ( $S_t$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ( $Y_t$ ) di Jawa Barat periode 1980-2009?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya ( $Y_{t-1}$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ( $Y_t$ ) di Jawa Barat periode 1980-2009?
4. Bagaimana pengaruh investasi ( $I_t$ ), tabungan ( $S_t$ ) dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya ( $Y_{t-1}$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ( $Y_t$ ) di Jawa Barat periode 1980-2009?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi ( $I_t$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ( $Y_t$ ) di Jawa Barat periode 1980-2009.
2. Untuk mengetahui pengaruh tabungan ( $S_t$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ( $Y_t$ ) di Jawa Barat periode 1980-2009.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya ( $Y_{t-1}$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ( $Y_t$ ) di Jawa Barat periode 1980-2009.

4. Untuk mengetahui pengaruh investasi ( $I_t$ ), tabungan ( $S_t$ ) dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya ( $Y_{t-1}$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ( $Y_t$ ) di Jawa Barat periode 1980-2009

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi sehingga dapat digunakan untuk pengembangan penelitian-penelitian lebih lanjut.

- Kegunaan Praktis

Bagi institusi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai pengaruh investasi dan tabungan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan bagi institusi terkait.

Bagi pihak pihak lain yang berkepentingan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi.